

SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN
TATANAN SOSIAL GLOBAL DAN
EKONOMI BERORIENTASI PASAR



DAFTAR ISI

3 | MUKADIMAH

3 | KAIDAH-KAIDAH POKOK

<i>1. Kerangka hukum</i>	<i>3</i>
<i>2. Kepemilikan properti dan lapangan kerja</i>	<i>3</i>
<i>3. Persaingan sebagai dasar</i>	<i>4</i>
<i>4. Penerapan prinsip kewajiban.....</i>	<i>4</i>
<i>5. Stabilitas lingkungan ekonomi</i>	<i>4</i>
<i>6. Penyediaan kebutuhan umum oleh pemerintah.....</i>	<i>4</i>
<i>7. Solidaritas dan jaminan sosial</i>	<i>4</i>
<i>8. Kompatibilitas insentif.....</i>	<i>4</i>
<i>9. Keberlanjutan</i>	<i>4</i>
<i>10. Pasar terbuka.....</i>	<i>5</i>

**5 | SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN TATANAN SOSIAL GLOBAL
DAN EKONOMI BERORIENTASI PASAR**

Penanggulangan krisis ekonomi dan finansial yang mendunia membutuhkan sebuah peraturan Internasional. Model peraturan Ekonomi Pasar Sosial menawarkan konsep orientasi tersebut. Model itu telah terbukti secara nasional. Berdasarkan perjanjian Lissabon, negara-negara Uni Eropa diwajibkan menjalankan „Ekonomi Pasar Sosial yang mampu bersaing“. Insititusi-institusi Uni Eropa, khususnya Parlemen Eropa, beberapa bulan yang lalu telah membuktikan bahwa mereka telah menjalankannya. Namun, prinsip-prinsip model ini juga harus mendapat perhatian secara Internasional. Sehubungan dengan hal itu, beberapa perwakilan pimpinan politik dan ekonomi Uni Eropa membuat sebuah Panduan.

MUKADIMAH

Keterkaitan ekonomi dan politik yang terus meningkat telah mengakibatkan pertumbuhan dan kompetisi yang lebih tinggi di banyak negara di seluruh dunia. Hal ini telah meningkatkan peluang memperoleh pendidikan, memperkuat infrastruktur sosial dan mengurangi kemiskinan. Meski demikian, perdamaian, kebebasan dan keadilan berada dalam keadaan terancam. Distribusi kesejahteraan global yang tidak merata adalah salah satu faktor penyebab meningkatnya ketegangan politik dan sosial. Satu-satunya cara untuk mengatasi krisis keuangan dan ekonomi saat ini adalah adanya aturan-aturan internasional untuk pasar uang. Hal ini membutuhkan komitmen bersama pada kegiatan ekonomi yang berkelanjutan. Kita butuh konsensus internasional yang memungkinkan tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial serta terselenggaranya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan berdasarkan prinsip dan nilai bersama. Bahkan di masa krisis, efek positif globalisasi tidak boleh dipertaruhkan oleh proteksionisme nasional atau regional. Dengan mempertimbangkan keberagaman antar budaya dan kemasyarakatan, orientasi ke arah kepentingan bersama, legitimasi demokrasi, dan martabat manusia yang tidak dapat diganggu gugat adalah dasar-dasar pembentukan konsensus tersebut.

KAIDAH-KAIDAH POKOK

Kaidah-kaidah pokok dalam hal ini adalah solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas menjamin bahwa ekonomi pasar senantiasa mendapat legitimasi karena berorientasi pada kepentingan bersama, sementara subsidiaritas menciptakan dan menjamin adanya ruang untuk tanggung jawab dan inisiatif individual.

1. Kerangka hukum

Sistem hukum yang berjalan, dapat diandalkan dan memiliki legitimasi demokrasi adalah dasar kegiatan ekonomi yang efisien dan berkelanjutan. Sistem hukum seperti itu menciptakan prakondisi untuk ekonomi yang kuat, administrasi negara yang efisien dan ramah terhadap warganya, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Unsur-unsur pengaturan dan pengawasan yang konsisten menjamin bahwa peraturan akan dipatuhi dan pelanggaran diberi sanksi. Ini bukan tujuan akhirnya. Peraturan adalah pendekatan yang pantas dan tepat untuk membentuk sistem imbalan dalam ekonomi kompetisi sehingga kegiatan kompetisi terdesentralisasi dapat menguntungkan masyarakat.

2. Kepemilikan properti dan lapangan kerja

Struktur ekonomi yang efisien dan diarahkan pada keberlanjutan harus didasarkan pada sistem kepemilikan properti pribadi yang menempatkan kekuasaan untuk pengelolaan barang di tangan badan usaha swasta dan rumah tangga. Kepemilikan pribadi memberikan insentif sangat penting untuk upaya mencari penghasilan melalui kerja dan merupakan dasar kewiraswastaan inovatif. Hanya sistem ekonomi yang didasarkan atas properti pribadi dapat menjaga keberlanjutan tersedianya lapangan kerja. Inilah dasar berkembangnya tanggung jawab dan inisiatif individu, yang tanpa keberadaannya tak terbayang adanya kemungkinan pemanfaatan potensi dan pendidikan, inovasi, pertumbuhan dan kesejahteraan tiap-tiap orang secara efektif. Kepemilikan pribadi adalah ciri sistem kompetisi di

mana banyak pemilik usaha kecil dan menengah bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi mereka melalui properti pribadi. Kepemilikan terkait erat dengan kewajiban sosial. Pemanfaatan kepemilikan pribadi harus berguna untuk kepentingan bersama. Hal ini menjamin kegiatan usaha yang hati-hati dan berkesinambungan, serta melindungi dari kecenderungan satu arah untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dalam waktu singkat.

3. Persaingan sebagai dasar

Sistem persaingan global yang didasarkan atas penentuan harga secara bebas mengoptimalkan alokasi sumber daya yang langka. Persaingan yang berjalan maksimal adalah mesin yang menggerakkan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Kompetisi semacam itu membangun efisiensi dan kemajuan, memperkokoh perilaku bertanggung jawab dan mencegah terbentuknya kekuatan pasar sepihak. Sistem persaingan mengharuskan adanya pasar terbuka, baik di tingkat nasional maupun internasional, serta pengendalian kekuatan pasar dan penumpukan, baik oleh negara maupun masyarakat internasional. Persaingan berakar pada kinerja dan kesetaraan peluang.

4. Penerapan prinsip kewajiban

Kebebasan bersaing mengharuskan penerapan prinsip kewajiban yang mengaitkan kinerja kompetitif dengan perilaku bertanggung jawab dari masing-masing pihak. Prospek keuntungan merangsang kompetisi, sementara tanggung jawab pribadi dalam hal terjadinya kerugian dapat menahan tindakan tidak bertanggung jawab dan perilaku mengambil risiko secara berlebihan.

5. Stabilitas lingkungan ekonomi

Ekonomi pasar membutuhkan kebijakan ekonomi jangka panjang dan stabilitas ekonomi makro sebaik mungkin. Ini terutama berlaku untuk pasar uang nasional dan internasional. Kepercayaan pada kerangka ekonomi yang stabil adalah prasyarat untuk penanaman modal dan keputusan konsumsi jangka panjang. Kepercayaan tersebut juga menuntut adanya penolakan terhadap langkah-langkah proteksionis dan kebijakan moneter yang ditujukan hanya untuk mencapai target ekonomi dan pertumbuhan nasional jangka pendek.

6. Penyediaan kebutuhan umum oleh negara

Dalam ekonomi pasar, negara harus menjamin ketersediaan kebutuhan umum apabila pasar tidak dapat memasok hal-hal tersebut atau tidak mampu mencukupinya. Infrastruktur yang efisien, peluang memperoleh pendidikan dasar, dan akses terhadap layanan kesehatan menyeluruh adalah bidang-bidang yang pembentukannya mengharuskan keterlibatan negara. Kebutuhan akan keterlibatan negara sangat besar terutama dalam hal masyarakat yang secara sosial kurang diuntungkan. Meski demikian, harus ada batasan untuk campur tangan negara.

7. Solidaritas dan jaminan sosial

Pertumbuhan ekonomi memfasilitasi pengurangan kemiskinan. Meski demikian, ekonomi pasar tidak bisa mencegah berkembangnya kesenjangan penghasilan dan adanya bagian tertentu dari masyarakat yang dirugikan. Karena itu ekonomi pasar membutuhkan sistem jaminan sosial yang efektif dan berbasis luas yang berjalan seiring kondisi pasar, mekanisme distribusi ulang di tingkat regional, dan sistem perpajakan berorientasi kinerja demi menjaga ketenteraman sosial dan memungkinkan partisipasi yang layak dari lapisan-lapisan luas di masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan.

8. Kompatibilitas insentif

Ekonomi pasar membutuhkan sistem pemungutan pajak yang berorientasi insentif untuk membiayai tugas-tugas negara. Pajak-pajak ini harus dirancang sedemikian rupa agar tidak mengurangi insentif terhadap kinerja atau menimbulkan distorsi dalam alokasinya.

9. Keberlanjutan

Setiap sistem ekonomi juga harus dinilai dari hasil-hasil jangka panjangnya. Dari kacamata ekologi, keadaan sosial dan fiskal, keberlanjutan adalah salah satu kriteria paling penting untuk keberhasilan, dan merupakan wujud keadilan antargenerasi. Sistem hukum yang didasarkan atas tanggung jawab dan kewajiban mendukung keberlanjutan tersebut. Kebijakan perlindungan iklim yang aktif, khususnya, adalah kewajiban ekonomi dan moral untuk menjaga landasan alami bagi keberadaan generasi mendatang.

10. Pasar bebas

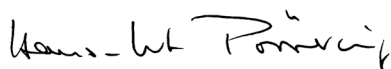
Berjalan sendiri-sendiri bukanlah obat bagi tiap negara dalam krisis saat ini. Sebaliknya, tindakan semacam itu justru memperburuk dampak global dari krisis ekonomi. Yang terpenting adalah kebijakan pasar bebas yang terkoordinasi dan ketaatan pada aturan-aturan main yang adil. Lembaga internasional terkait harus lebih diperkuat untuk melawan proteksionisme dan nasionalisme ekonomi.

SYARAT-SYARAT KEBERHASILAN TATANAN SOSIAL GLOBAL DAN EKONOMI BERORIENTASI PASAR

Ekonomi global yang terbuka membutuhkan kerangka internasional. Prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang telah terbukti efektif di tingkat nasional dan Eropa dalam kerangka sistem nilai dan peraturan ekonomi yang bersifat sosial dan berorientasi pasar harus pula diterapkan di tingkat internasional. Prinsip-prinsip ini menciptakan hubungan

antara kebebasan dan tanggung jawab demi kepentingan bersama. Aturan-aturan ini harus ditingkatkan, terutama di bidang pasar uang, dan diberlakukan dalam sistem perdagangan global. Yang harus dilakukan adalah perluasan legitimasi, berjalan dan bekerjasamanya lembaga-lembaga internasional, sekaligus pembentukan forum integratif untuk kerja sama. Sistem hukum dan tatanan demokrasi yang dapat diandalkan dan diarahkan pada desentralisasi merupakan dasar untuk itu. Persaingan dan partisipasi politik dalam negeri meningkatkan perkembangan ekonomi dan tatanan sosial ekonomi internasional yang stabil. Hanya kerangka semacam inilah yang bisa menjamin tersedianya informasi penting oleh media dan asosiasi independen. Konsensus dan komitmen yang dibuat oleh para pemain politik, ekonomi dan kegiatan sosial untuk melakukan rekonsiliasi kepentingan dalam konteks nasional dan internasional adalah prasyarat untuk "kesejahteraan bagi semua orang."

8 Juli 2009



Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering
Presiden Parlemen Eropa



Prof. Dr. Bernhard Vogel
Mantan Perdana Menteri
Ketua Yayasan Konrad Adenauer



Joseph Daul
Ketua Fraksi EVP Parlemen Eropa



Dr. Wilfried Martens
Ketua Partai Rakyat Eropa (EVP)



Prof. Dr. Cees P. Veerman
Direktur Institut Riset Partai CDA